**Penegakan Hukum Terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Pemurnian atau Pengolahan Emas
Tanpa Izin di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Pasal 55**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Oleh : Indri Anggreini

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita, SH.,M.H

Alamat: Jalan Riau Ujung Gang Karya Makmur No. 5, Pekanbaru

ABSTRACT

Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that: "The earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the State and used as much as possible for the prosperity of the people. Understanding of mining according to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Article 1 Paragraph (1) mining is a part or all stages of activities in the framework of research or management of mineral or coal which includes general investigation, exploration, feasibility studies, construction, mining, processing and refining, transportation and sales, and post-mining activities. Gold mining and refining activities also took place in the Indragiri Hulu Regency specifically in Selunak Village, Batang Peranap Subdistrict, besides in Batang Peranap District the same thing happened in Peranap Subdistrict and in Kelayang District. The activity was carried out by the people who were around the area and there were even people from other regions. This activity has become a livelihood for the community, but the gold processing and refining activities were carried out without permission, so that in conducting these business activities they did not see the impact that would be caused by their activities.

This research is a sociological or empirical research that is the type of research that uses the assumption of the community in finding facts that occur in the field to answer an existing problem. This research was carried out in the jurisdiction of the Indragiri Hulu Resort Police. While the population and sample are parties related to the problems examined in this study, data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this study with interviews and literature review.

From the results of the research that the researcher did, it can be concluded, first, Law Enforcement for Participants in Participating in Crimes of Unlicensed Gold Purification and Processing in Indragiri Hulu Regency Based on Article 55 of the Criminal Code, Indragiri Hulu Regional Police have not fully enforced the law, because there is still room for perpetrators criminal act. Barriers to Law Enforcement against Participants in Participation in Unlicensed Gold Purification or Processing in Indragiri Hulu Regency are human resources (HR) factors, the difficulty for the investigator in obtaining evidence in the form of letters, documents and other evidence. The efforts made by the Police, here are the efforts that have been made by the Police in law enforcement, the recruitment of human resources needed by the Police must be done transparently and the employee must have certainty and capability in the Police field, the mutation system and job rolling must be truly pay attention to the principles of justice and quality of human resources, increase training for the Police.

Keywords : Law Enforcement - Inclusion - Purification Crime - Without Permission.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Berkaitan dengan pasal tersebut, Salim HS menyatakan bahwa:¹

“Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.”

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Pertambangan rakyat sering terjadi di daerah-daerah terpencil, biasanya mereka yang melakukan pertambangan rakyat ini merupakan masyarakat sekitar wilayah tersebut, masyarakat menggunakan daerah-daerah sungai untuk dijadikan objek pertambangan

salah satu contohnya adalah pertambangan dan pemurnian emas. Kegiatan pertambangan dan pemurnian emas juga terjadi di daerah Kabupaten Indragiri Hulu Khususnya di Desa Selunak Kecamatan Batang Peranap, selain di Kecamatan Batang Peranap hal yang sama terjadi juga di Kecamatan Peranap dan di Kecamatan Kelayang. Kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar daerah tersebut dan bahkan ada juga masyarakat dari daerah lain. Kegiatan tersebut sudah menjadi mata pencaharian bagi masyarakat, namun kegiatan pengolahan dan pemurnian emas tersebut dilakukan tanpa izin, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha tersebut mereka tidak melihat dampak yang akan disebabkan oleh kegiatan mereka.

Kasus pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin di Kecamatan Batang Peranap ini terjadi pada tahun 2017. Kegiatan tersebut dilakukan di sungai Batang Peranap. Namun pengolahan dan pemurniannya dilakukan secara tradisional dirumah warga yaitu dengan memanfaatkan alat-alat yang ada, seperti kompor, air raksa, alat pemurnian emas, alat penghalus, dan alat-alat yang dibutuhkan lainnya. Sampai saat ini mereka masih melakukan kegiatan penambangan emas tersebut. Dampak dari kegiatan tersebut saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar, seperti tercemarnya sungai sebagai tempat penambangan, berubahnya ukuran sungai, berkurangnya ekosistem sungai yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara Bapak M.S pelaku tindak pidana pemurnian dan pengolahan emas, beliau mengatakan bahwa “sebenarnya yang melakukan kegiatan usaha tersebut tidak hanya satu orang yang ditangkap itu saja, namun masih ada beberapa orang yang melakukan usaha tersebut namun pada saat penggrebekan mereka sudah mengetahui akan ada kegiatan penggrebekan, sehingga mereka dapat menyembunyikan barangbukti serta melarikan diri untuk sementara waktu, dan menghentikan kegiatan usaha setelah beberapa hari mereka akan kembali dan melakukan kegiatan yang sama”. Beliau juga mengatakan dari usaha tersebut mereka bisa mendapatkan

¹Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1.

sampai puluhan juta dari hasil penjualan tambang emas dalam kurun waktu 1-2 bulan.²

Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau hanya dibidang refresif, istilah penegakkan hukum disini meliputi represif maupun preventiv. Sedangkan menurut sudarto memberi arti penegakkan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sesungguhnya terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).³

Uraian di atas untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap orang-orang yang posisinya sebagai turut serta melakukan atau penyertaan tindak pidana pengolahan dan pemurnian emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul "***Penegakan Hukum Terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Pemurnian atau Pengolahan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pemurnian atau pengolahan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah hambatan penegakan hukum terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pemurnian atau pengolahan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Apakah upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pemurnian atau pengolahan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana pemurnian atau pengolahan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk menemukan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pemurnian atau pengolahan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pemurnian atau pengolahan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi petugas kepolisian khususnya bidang penegakan hukum penyertaan dalam tindak pidana penambangan emas tanpa izin dan instansi yang terkait.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum terhadap penyertaan dalam tindak pidana pemurnian atau pengolahan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan

²Wawancara dengan Bapak M.S pelaku Tindak Pidana Pemurnian Atau Pengolahan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Batang Peranap, pada tanggal 15 Januari 2018 Jam 9.30 WIB.

³Aniko Juanda, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2013, hlm. 4.

tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.⁴

Melaksanakan penegakan hukum yang selaras dengan pembangunan bukanlah sesuatu yang mudah dan merupakan permasalahan manusia yang kompleks sebagai suatu kenyataan sosial. Sehubungan dengan ini ingin dikemukakan beberapa masalah yang dapat merupakan pendukung dan penghambat penegakan hukum yang rasional, serta tanggung jawab dan bermanfaat yang harus ditanggulangi bersama. Adapun masalah yang bersangkutan adalah antara lain sebagai berikut:⁵

1. Pengertian penegakan hukum. Bagi para partisipan dalam usaha penegakan hukum harus jelas terlebih dahulu mengenai yang diartikan dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, pengertian yang tidak tepat, dapat mengakibatkan pengambilan sikap dan penentuan tindak yang tidak tepat pula.
2. Penggairahan berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum. Masalah berpartisipasi ini berhubungan erat dengan masalah-masalah lain, seperti faktor-faktor pendukung dan penghambat berpartisipasi yang berhubungan dengan unsur-unsur politis, ekonomis, sosial, budaya, dan religi yang dapat berpengaruh positif maupun negatif.
3. Pengembangan kemanusiaan antar para partisipan, subjek, dan objek pelaksanaan usaha penegakan hukum. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, karena merupakan masalah yang pelik dan peka dalam berpartisipasi dan pelaksanaan penegakan hukum. Masalah ini mutlak harus

diperhitungkan untuk mencegah sikap dan tindak dalam usaha penegakan hukum yang tidak berprikemanusiaan dan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Jaminan perlindungan bagi partisipan (mental, fisik dan sosial). Hal ini merupakan masalah utama lain yang perlu mendapatkan perhatian dan diadakan dalam usaha penegakan hukum. Hal ini berhubungan erat dengan sifat, situasi, dan kondisi usaha penegakan hukum tersebut.

2. Konsep Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha negara yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁶ Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “*delik*” yang diartikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁷ Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, dimana perkataan “Tindak” menggambarkan keadaan suatu peristiwa hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindak dan bertindak.⁸ Pelanggaran atas suatu tindak pidana biasanya sudah diketahui akibat yang akan ditimbulkan oleh pelaku.⁹

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰ Adapun jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1.

⁷ Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69.

⁹E-gold, LTD., Dkk. 2008, “Trial Motion, Memorandum and Affidavit”, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 12 Maret 2018 dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

¹⁰ Erdianto, Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 6.

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 125-127

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpa*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran tentang judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan-batasan yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.¹¹
2. Penyertaan (*deelneming*) adalah perbuatan yang terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.¹²
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

- bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³
4. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral.¹⁴
 5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁵
 6. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan: atau batubara dan mineral ikutannya.¹⁶
 7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Menurut kamus *Webster's International*, penelitian merupakan penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu yang dilakukan secara berhat-hati, penuh kesabaran, dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan

¹³*Ibid*, hlm. 54.

¹⁴Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁵Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁶Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁷Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁸J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 1.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

¹²Moeljatno, *Ibid*, hlm. 75.

bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹⁹

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²⁰ Bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang penegakan hukum terhadap penyertaan dalam tindak pidana pemurnian atau pengolahan emas tanpa izin di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu, alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Indragiri Hulu karena ada beberapa tempat praktek usaha pemurnian atau pengolahan emas tanpa izin sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.²¹ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengansifat atau ciri yang sama.²² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hulu
- 2) Pelakutindak pidana pengolahan atau pemurnian emas di Kabupaten Indragiri Hulu
- 3) Pelaku penyertaan tindak pidana pengolahan atau pemurnian emas di Kabupaten Indragiri Hulu

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam menentukan penelitian. Metode yang dipakai adalah metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis dapat dari bahan-bahan bacaan yang bersifat mendukung data primer. Seperti buku literatur, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pembahasan.

3) Bahan Hukum Tertier

¹⁹Syaifurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptk Press, Jakarta, 2005, hlm. 17.

²⁰ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.17.

²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.118.

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan beberapa teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini semua data yang diperoleh dari bahan penelitian akan disusun dan dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan data primer dan data sekunder dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan fakta yang terjadi, dipelajari kemudian dituangkan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penegakan hukum berasal dari dua kata yaitu penegakan dan hukum. Penegakan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menegakan. Menegakan sendiri dapat diartikan sebagai: mendirikan

menjadikan (menyebabkan) tegak, memelihara dan mempertahankan. Dengan demikian secara bahasa istilah "penegakan hukum" dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk menjadikan, menyebabkan, mempertahankan dan memelihara hukum, sedangkan hukum sendiri beragam definisinya, tetapi secara bahasa dapat diartikan sebagai: 1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.²³

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvSBelanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.²⁴ Perlu dijelaskan terlebih dahulu adanya penafsiran yang sama atau yang berbeda mengenai pengertian perbuatan pidana dan tindak pidana. Selain pengertian yang diajukan oleh Jonkers, juga telah dikembangkan pengertian perbuatan pidana, sebagaimana diterapkan oleh Prof. Moeljatno. Sebaliknya pengertian tindak pidana belum diungkap secara jelas pemisahannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dapat dianggap bahwa tindak pidana termasuk di dalamnya unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pengertian tindak pidana berbeda dengan dengan pengertian perbuatan pidana.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudartobahwa untuk

²³ Departemen Pendidikan Nasional, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 950

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-TeoriPemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.

C. Tinjauan Umum tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana

1. Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP

Penyertaan atau *Deelneming* dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. *Deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Oleh karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau

beberapa perbuatan oleh masing masing orang itu juga berbeda.²⁵

2. Dasar Hukum Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP

Pada KUHP Pasal 55 dan 56 kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam melaksanakan tindak pidana yaitu: yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan menghasut yang dihukumi sebagai pembuat. Terkadang sering orang yang tidak berbuat menjadi perencana (otak) kejahatan (*intellectuele dader*) dan juga disebut pembuat tidak langsung (*middelijke dader*) peminjam tangan orang dan yang membuat sendiri hanya menjadi kaki tangan atau alat (*werktuig*) disebut juga pembuat langsung (*onmiddelijke dader*).²⁶ mengenai golongan yang dikenal dengan medededer (disebut para peserta atau para pembuat) dan Pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).

3. Bentuk-Bentuk Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP

Dalam KUHP penyertaan tindak pidana kita dapati bentuk-bentuk kerjasama dalam melakukan tindak pidana, yaitu: yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, serta yang menghasut semuanya dijatuhi hukuman sebagai pembuat.²⁷

a. Mereka yang Melakukan

Yang melakukan adalah pembuat lengkap karena perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Biasanya dengan mudah dikatakan siapa yang menurut undang-undang menjadi yang melakukan pembuat lengkap dan siapa yang tidak menjadi melakukan. Tetapi penentuan ini sukar dalam delik-delik yang terjadi karena yang melakukan menimbulkan atau meneruskan satukeadaan yang terlarang (oleh undang-undang) dan tidak diterangkan dengan jelas siapa yang berkewajiban

²⁵Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 71.

²⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 63

²⁷*Ibid*, hlm. 250.

menghindarkan terjadinya delik itu atau menghentikan berlangsungnya.

b. Menyuruh Lakukan

Ciri dari menyuruh melakukan yakni mempergunakan orang lain yang tidak mampu bertanggungjawab atau yang tidak tahu seakan-akan sebagai alat tak berkehendak ditangannya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan jahat.³⁸ Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh lakukan (*doen plager*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS, Belanda menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya. Apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui disesatkan dan tunduk pada kekerasan.

c. Turut Serta Melakukan

Ialah seorang pembuat yang ikut serta mengambil prakara dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Menurut Memorie Van Toelichting mengemukakan bahwa turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu peristiwa pidana.

d. Orang yang Sengaja Menganjurkan

Pembuat penganjur disebut juga actor intellectualis seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 Ayat (1) dengan sangat singkat ialah “*yang menyuruh melakukan*”, tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif yang sekaligus unsur subyektif. Rumusan itu selengkapnyalah “*mereka yang dengan memberi*

atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberikesempatan, sarana dan keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan”²⁸

e. Pembantuan

Mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga pasal yaitu terdapat pada pasal 56, 57 dan 60. Sedangkan pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan unsur subyektif pembantuan serta macam bentuk pembantuan. Sedangkan pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum bagi Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana Pemurnian dan Pengolahan Emas tanpa Izin di Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Pasal 55 KUHP

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Dalam kasus tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu terkait tindak pidana pemurnian, pengolahan dan penambangan emas secara ilegal peneliti melihat adanya pidana penyertaan yang terjadi yaitu antara pemilik pertambangan ilegal dan para pekerja atau kru dari pertambangan tersebut, maka untuk itu perlu dilakukan penegakan hukum secara komprehensif. Dalam unsur-unsur tindak pidana penyertaan yakni apabila dalam suatu peristiwa pidana terlebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.

Adapun kegiatan penambangan ini dilakukan oleh tiga pengusaha, dari tiga

²⁸Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 108.

usaha tersebut terdapat 10 orang yang melakukan tindak pidana itu, namun hanya tiga orang yang menjalankan pidana. Dari 10 orang ini 3 orang sebagai pemilik usaha yang melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin dan 7 lainnya sebagai orang yang membantu dan ikut serta dalam melakukan usaha pertambangan tersebut.²⁹

Jika ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 55 KUHP dalam frasa “mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dapat dipidana sebagai pembuat pidana” artinya bahwa siapa pun orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana meskipun dia tidak ikut melaksanakan tindak pidana maka dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Sementara orang yang turut serta melakukan tindak pidana artinya orang yang ikut melakukan tindak pidana tersebut baik dilakukan oleh seorang diri maupun berkelompok. Maka dengan begitu seharusnya para kru penambang emas ilegal meskipun mereka sifatnya hanya disuruh bekerja saja sesuai dengan keahliannya mereka tetap harus dituntut pidana, namun memiliki tanggung jawab pidana yang berbeda dengan si pemilik pertambangan emas.

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Selain itu juga untuk memenuhi unsur-unsur pembalasan yang konstruktif atau penderitaan yang disengaja dari tekanan emosional kepada pelaku. Hukum pidana dalam prosesnya juga melalui penegakan hukum, penegakan hukum yang baik dan sesuai tentunya memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pada teori penegakan hukum itu tercapai.

Dalam teori penegakan hukum tujuan penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan

mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya tanpa mengenyampingkan apa yang menjadi kewajibannya. Apabila antara hak dan kewajiban tidak berjalan dengan bersamaan akan menimbulkan suatu masalah yang baru. Begitu pula dalam kasus penyertaan dalam tindak pidana pemurnian emas tanpa izin. Banyak proses penegakan hukum yang harus dijalani, selain itu juga akibat yang ditimbulkan dari pada perbuatan pelaku sangat merugikan masyarakat sekitar, oleh karenanya pelaku penyertaan harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku demi tegaknya hukum yang berkemanfaatan dan berkeadilan.

B. Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyertaan dalam Tindak Pidana Pemurnian atau Pengolahan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Indragiri Hulu

Indonesia adalah Negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai Negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Dimanapun juga, sebuah Negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus pidana.

Dalam setiap permasalahan tindak pidana yang terjadi di sekitar kita, pasti selalu ada hambatan yang membuat suatu tindak pidana tersebut sulit untuk diungkap kebenarannya oleh instansi terkait. Hukum harus memiliki suatu kepastian hukum yang dapat memberikan keadilan kepada setiap orang, sesuai dengan teori penegakan hukum yang mempunyai tujuan dasar berupa proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang

²⁹ Wawancara Ipda Juraidi Penyidik dalam kasus pemurnian dan pengolahan emas di Dusun Tua Palang Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang, pada tanggal 16 Januari 2018 Jam 9.00 WIB.

mantap dan mengejutkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :³⁰

1. Hukum (Undang-Undang).

Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain.³¹

1. Undang-Undang tidak berlaku surut.
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
5. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.
6. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
7. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Bina cipta, Jakarta, 1983, hlm.15.

³¹ Soerjono Soekanto dan Purbacaraka, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, 1970.

pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Penegak hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan perilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasayang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik

(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

C. Upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemurnian atau Pengolahan Emas tanpa Izin di Kabupaten Indragiri Hulu

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Oleh karenanya menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³²

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyertaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kabupaten Indragiri Hulu ada beberapa upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penyertaan:

1. Perekrutan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan oleh Kepolisian harus dilakukan dengan transparan dan pegawai tersebut harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidang Kepolisian.
2. Sistem mutasi dan *rolling* jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem mutasi dan *rolling* jabatan yang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan dan latar belakang pendidikan seseorang maupun prestasinya, namun lebih didasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.

3. Sistem pelatihan Kepolisian harus lebih ditingkatkan sehingga anggota Kepolisian mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi peningkatan kualitas dan profesionalismenya sehingga akan meningkatkan kinerja Kepolisian terutama dalam hal mengungkapkan kasus penyertaan dalam tindak pidana pertambangan emas ilegal. Khususnya di wilayah hukum daerah Indragiri Hulu
4. Kepolisian Daerah Indragiri Hulu melakukan sinergitas kegiatan pengawasan dan melakukan operasi rutin bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertambangan serta masyarakat di Daerah Indragiri Hulu.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan yang telah peneliti uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam kasus tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu terakait tindak pidana pemurnian, pengolahan dan penambangan emas secara ilegal penulis melihat adanya pidana penyertaan yang terjadi yaitu antara pemilik pertambangan ilegal dan para pekerja atau kru dari pertambangan tersebut. maka untuk itu perlu dilakukan penegakan hukum secara komprehensif.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Kabupaten Indragiri Hulu dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyertaan yaitu faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor sulitnya bagi pihak penyidik dalam memperoleh bukti-bukti berupa surat, dokumen-dokumen dan bukti lainnya.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, berikut adalah upaya yang telah dilakukan Kepolisian dalam penegakan hukum penyertaan, perekrutan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Kepolisian harus dilakukan dengan transparan dan

³²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 24.

pegawai tersebut harus mempunyai kepastian dan kapabilitas dibidang Kepolisian, sistem mutasi dan *rolling* jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, peningkatan pelatihan terhadap Kepolisian.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus ditingkatkan lagi dalam proses penyidikan, sehingga dalam penegakan hukumnya dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Kepolisian Sektor Kabupaten Indragiri Hulu dalam penegakan hukum kasus tindak pidana penyertaan banyak menuai hambatan baik dalam ruang lingkup internal maupun eksternal. Sehingga dalam penegakan hukum kasus tindak pidana penyertaan dibutuhkan perencanaan strategi yang matang melalui sumber daya manusia yang profesional.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penegakan hukum penyertaan sepertinya memperoleh perhatian khusus, dikarenakan banyaknya efek yang ditimbulkan baik dari segi pelanggaran hukum maupun keresahan masyarakat akibat pelanggaran hukum yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Djamali,1990, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Adam, Aswarni, zulfikri, 2006, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Pekanbaru, Alaf Riau.
- Al-Banjary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta, Restu Agung
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Poernomo,1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta,Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*,Jakarta, Raja Grafindo.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT.Rineka Cipta, Jakarta: 2013.
- Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004.
- Liliana, Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Arief, Nawawi, Barda, Barda, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardjo,Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*,Bandung, Citra Aditya Bakti.

_____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*,
Sinar Baru, Bandung.

RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul
Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat
Kajian Informasi, Jakarta, 2001.

Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,
Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Schaffmeister Dkk, 1995, *Hukum Pidana*,
Yogyakarta, Liberty.

Soebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian
Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Soekanto, Soerjono, 1983. *Penegakan Hukum*.
Bandung, Bina Cipta.

_____, Soerjono, *Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta,
Jakarta, 2004.

Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik
Pertambangan Indonesia Menurut
Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian
Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2011.

Syaifurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi
dalam Mengungkap jaringan Narkoba*,
Restu Agung dan Ptik Press, Jakarta,
2005.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam
Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002.

B. Jurnal

Aniko Juanda, "Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penambangan
Emas Ilegal di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kuantan Singingi",
Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Riau, 2013.

Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum dalam
Pembangunan Hukum Indonesia", *Jurnal*

Erdiansyah, "Kekerasan dalam Penyidikan
dalam Perspektif Hukum dan Keadilan
"*Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum
Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus
2010.

E-gold, LTD., Dkk. 2008, "*Trial Motion,
Memorandum and Affidavit*", *Jurnal
Westlaw*, diakses melalui
<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 12 Maret 2018 dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

Gary L. Hoving v James Patrick Hedges, 2008,
"*Verdict and Settlement Summary*",
Jurnal Westlaw, diakses melalui
<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 12 Maret 2018 dan diterjemahkan oleh Goggle Translate.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Website

Jimly Asshiddiqie, "*Penegakan Hukum*",
Makalah dari situs resmi.
<http://www.Jimly.com>.